

Diplomasi “Bocor Taktis” dan Penegasan Prinsip Kedaulatan: Analisis Strategis atas Kebocoran Rekaman Presiden Indonesia Menjelang Forum 2+2 dengan Jepang, November 2025

Oleh: Dr. Surya Wiranto, SH MH¹


Abstrak

Kebocoran rekaman percakapan rahasia antara Presiden Indonesia Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Safri Syamsuddin pada pertengahan November 2025, beberapa jam sebelum pertemuan 2+2 di Tokyo, merupakan peristiwa diplomatik yang kompleks. Naskah ini menganalisis insiden tersebut bukan sebagai kegagalan keamanan, melainkan sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang disengaja, sebuah “*kebocoran taktis*”. Analisis mendalam terhadap isi rekaman, yang menegaskan prinsip Satu China dan menarik paralel antara Taiwan dan Papua, mengungkap strategi komunikasi tingkat tinggi untuk mengirimkan *signalling* yang kuat kepada Jepang dan Amerika Serikat tanpa menghina mereka secara diplomatik. Kajian ini berargumen bahwa tindakan tersebut merefleksikan pergeseran strategis Indonesia pasca-bergabung dengan BRICS, menuju postur yang lebih mandiri dan berani menolak tekanan untuk menjadi proxy dalam kompetisi geopolitik Amerika-China. Pilihan taktik ini didukung oleh kerangka hukum nasional yang menjamin kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Kata Kunci: Kebocoran Taktis, Diplomasi Sinyal, Kedaulatan Nasional, Prinsip Satu China, BRICS, Komunikasi Strategis, Forum 2+2, Politik Luar Negeri Indonesia.

1. Konteks – Bocornya Rekaman Rahasia dalam Geopolitik yang Memanas

Dalam arena hubungan internasional yang semakin kompetitif, insiden kebocoran informasi rahasia sering kali bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan sebuah manuver politik yang terukur. Peristiwa bocornya rekaman percakapan telepon antara Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, dengan Menteri Pertahanan Safri Syamsuddin pada pertengahan November 2025, beberapa jam sebelum Menteri Syamsuddin bersama Menteri Luar Negeri menghadiri forum diplomatik 2+2 dengan Jepang di Tokyo pada tanggal 18 November 2025, harus dipahami dalam konteks geostrategis yang sangat sensitif. Rekaman yang seharusnya merupakan komunikasi internal tertutup itu tiba-tiba menyebar luas di ruang digital, menampilkan suara Presiden yang lugas dan tanpa ambiguitas memberikan pengarahan politik mengenai posisi Indonesia dalam isu Taiwan. Konteks waktu kebocoran ini, tepat sebelum pertemuan penting, menjadikannya sebagai sebuah *fait accompli* diplomatik, sebuah pesan yang tidak terbantahkan yang tiba lebih dulu di meja perundingan sebelum delegasi Indonesia

¹ Penulis adalah Laksamana Muda TNI (Purn) Adv. Dr. Surya Wiranto, SH MH., Penasihat *Indo-Pacific Strategic Intelligence* (ISI), Anggota *Senior Advisory Group* IKAHAN Indonesia-Australia, Dosen Program Pascasarjana Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Indonesia, Ketua Departemen Keuangan PEPABRI, Anggota FOKO, Sekretaris Jenderal IKAL Strategic Centre (ISC) dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Maritim Indonesia (IIMS). Beliau juga aktif sebagai Pengacara, Kurator, dan Mediator di firma hukum Legal Jangkar Indonesia .

mendarat di Bandara Haneda. Situasi ini mengingatkan pada teori permainan (*game theory*) dalam hubungan internasional, di mana pemain terkadang sengaja mengungkapkan informasi pribadi (*private information*) untuk mengubah perhitungan pihak lawan dan menghilangkan ruang negosiasi pada poin-poin tertentu. Jepang, di bawah kepemimpinan baru Perdana Menteri Shinzo Abe yang dikenal dengan pendirian kuatnya mendukung keamanan Taiwan, jelas berniat menggunakan forum 2+2 tersebut untuk memperoleh legitimasi regional dari Indonesia, kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, kebocoran ini tidak dapat dilihat sebagai insiden terisolasi, tetapi sebagai bagian integral dari pertarungan pengaruh antara kekuatan besar, dengan Indonesia berusaha mempertahankan otonomi strategisnya di tengah tekanan yang kian meningkat.

2. Analisis Masalah – Dilema Indonesia dan Logika Cakrawala Cermin Kedaulatan

Inti dari arahan Presiden dalam rekaman yang bocor tersebut adalah penolakan yang sangat jelas untuk mengeluarkan pernyataan bersama (*joint statement*) yang mendukung posisi Jepang tentang Taiwan. Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa Taiwan adalah provinsi Tiongkok, dan masalah tersebut merupakan urusan dalam negeri Tiongkok, sama halnya dengan Papua adalah urusan dalam negeri Indonesia. Pernyataan ini bukan sekadar pengulangan dari kebijakan Satu China yang telah lama dianut Indonesia, tetapi merupakan penguatan yang disampaikan melalui logika *cakrawala cermin kedaulatan* (*mirror principle of sovereignty*). Logika ini merupakan instrumen diplomatik yang canggih dan berakar pada hukum internasional, khususnya prinsip non-intervensi yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 2 (7) serta Konstitusi Indonesia, UUD 1945, yang menjunjung tinggi kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dengan menarik paralel langsung antara Taiwan dan Papua, pemerintah Indonesia secara implisit membangun sebuah *strategic linkage*: setiap pengakuan terhadap hak separatis di Taiwan oleh Indonesia akan membuka preseden yang sama berbahayanya bagi klaim separatis di Papua, dengan potensi dukungan eksternal. Ini adalah peringatan yang jelas kepada semua pihak, baik Jepang, Amerika Serikat, maupun aktor lainnya, bahwa bermain dengan isu separatisme adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. Analisis terhadap transkrip menunjukkan bahwa arahan ini lahir dari insting untuk menghindari *diplomatic trap* atau jebakan diplomatik, di mana Indonesia dapat terdorong untuk mengambil posisi yang bertentangan dengan kepentingan nasional jangka panjangnya demi memenuhi harapan seketika dialog. Masalahnya menjadi semakin kompleks karena Indonesia, sebagai anggota baru BRICS, harus menjaga hubungan baik dengan Tiongkok, sementara di sisi lain juga memiliki kemitraan strategis dengan Jepang dan Amerika Serikat. Rekaman tersebut mengungkap ketegangan mendasar antara kesetiaan pada aliansi tradisional dan kepentingan strategis baru dalam kerangka multipolar.

3. Solusi Strategis – Interpretasi “Kebocoran Taktis” Sebagai Instrumen Komunikasi Strategis

Menghadapi dilema tersebut, hipotesis yang paling masuk akal secara strategis adalah bahwa kebocoran rekaman tersebut merupakan sebuah tindakan yang disengaja, atau yang dalam studi intelijen disebut sebagai *kebocoran taktis* (*tactical*

leak) atau *kebocoran yang disetujui (approved leak)*. Solusi ini memungkinkan Indonesia mencapai beberapa tujuan penting sekaligus tanpa harus menanggung biaya diplomatik langsung dari penolakan resmi. **Pertama**, secara *de facto*, kebocoran ini telah mengkomunikasikan *red lines* atau batasan yang tidak boleh dilampaui kepada PM Takichi dan para pembuat kebijakan di Washington sebelum pertemuan Tokyo dimulai, sehingga mencegah situasi memalukan dimana delegasi Indonesia harus menolak permintaan Jepang secara terbuka di depan media. **Kedua**, secara resmi, pemerintah Indonesia dapat tetap menjaga *plausible deniability* atau penyangkalan yang masuk akal mengenai asal-usul kebocoran, sambil tetap menghadiri pertemuan dengan penuh kesopanan dan menjalankan hubungan bilateral seperti biasa. Ini adalah bentuk *signalling* atau penyampaian sinyal yang kuat namun halus, sebuah metode komunikasi strategis yang umum digunakan dalam diplomasi tinggi untuk menyampaikan pesan yang terlalu keras untuk dikatakan secara resmi di atas panggung terbuka. **Ketiga**, solusi ini memproyeksikan citra kepemimpinan yang tegas dan berdaulat di mata publik domestik dan regional, memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjaga kedaulatan nasional. Dengan kata lain, kebocoran taktis berfungsi sebagai *substitute* atau pengganti untuk pernyataan kebijakan resmi yang mungkin memicu krisis diplomatik, sekaligus sebagai *amplifier* atau penguat untuk pesan-prinsip yang ingin disampaikan. Dasar hukum untuk tindakan menjaga kedaulatan semacam ini dapat ditemukan dalam mandat konstitusional Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dan panglima tertinggi, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yang mewajibkannya untuk mengambil segala langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional.

4. Aksi dan Implementasi – Konsistensi Kebijakan dalam Kerangka BRICS dan Hubungan Internasional

Implementasi dari strategi yang terungkap dalam rekaman tersebut terlihat dalam konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia pasca-bergabung dengan blok BRICS. Keanggotaan dalam BRICS, yang diperkuat dengan masuknya beberapa negara ekonomi besar baru, telah memberikan Indonesia alternatif kerangka kerjasama ekonomi dan politik di luar struktur yang didominasi Barat, sehingga meningkatkan *bargaining power* atau daya tawar Indonesia. Kebocoran rekaman tersebut dapat dibaca sebagai proklamasi kemandirian strategis yang baru, sebuah pernyataan bahwa Jakarta tidak lagi merasa terikat secara mutlak oleh tekanan Washington atau sekutunya. Dalam konteks ini, arahan Presiden untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai *proxy* atau boneka dalam persaingan Amerika Serikat-Tiongkok merupakan panduan aksi yang operasional. Secara praktis, ini berarti menolak untuk diikutsertakan dalam aliansi keamanan yang eksklusif yang ditujukan untuk mengepung Tiongkok, seperti kuartet Quad (Amerika Serikat, Jepang, Australia, India) atau pakta trilateral AUKUS. Sebaliknya, Indonesia akan terus memprioritaskan kerjasama inklusif di kawasan melalui ASEAN, sambil secara bersamaan memperdalam kemitraan strategis dengan semua pihak, termasuk Tiongkok melalui BRICS dan negara-negara Barat melalui kemitraan yang sudah ada. Aksi ini sejalan dengan politik luar negeri bebas-aktif yang menjadi jiwa dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Kerja Sama ASEAN-Indonesia 2023-2045, yang menekankan pada sentralitas ASEAN dan kerjasama yang setara. Dengan demikian, meskipun tampak sebagai reaksi

spontan, kebocoran rekaman dan isinya justru merefleksikan implementasi yang konsisten dari *grand strategy* Indonesia dalam menghadapi tatanan dunia yang berubah.

5. Dampak dan Evaluasi – Mematahkan Momentum Diplomatik dan Mengukuhkan Posisi Tawar

Dampak langsung dari insiden kebocoran ini bersifat multifaset dan strategis. Bagi Jepang, bocornya rekaman secara efektif telah *mematikan momentum* diplomatik yang dibangun PM Takichi untuk forum 2+2. Agenda rahasia untuk mendapatkan dukungan Indonesia terkait Taiwan telah terekspos dan dinetralisir sebelum pertemuan dimulai, mengubah dinamika pertemuan dari sebuah negosiasi menjadi sekadar pertukaran pandangan, karena posisi final Indonesia sudah diketahui publik. Bagi Amerika Serikat, ini adalah sinyal jelas bahwa hegemoni dan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, sedang menghadapi tantangan serius. Hilangnya potensi dukungan Indonesia membatasi efektivitas strategi *containment* atau pembendungan terhadap Tiongkok, khususnya dalam mengontrol selat-selat laut vital seperti Selat Malaka, Sunda, dan Lombok yang merupakan *chokepoints* strategis bagi AL Tiongkok. Bagi Tiongkok, rekaman ini merupakan konfirmasi publik yang sangat berharga atas komitmen Indonesia terhadap Kebijakan Satu China, memperkuat pondasi kepercayaan dalam hubungan bilateral, khususnya dalam kerangka BRICS. Bagi Indonesia sendiri, meskipun berisiko menimbulkan ketidaknyamanan jangka pendek dengan Jepang, langkah ini justru mengukuhkan posisi tawarnya sebagai kekuatan mandiri yang tidak dapat dipaksa. Evaluasi menunjukkan bahwa tindakan *kebocoran taktis* ini berhasil mencapai tujuan utamanya: menyampaikan pesan keras tanpa memutuskan saluran diplomatik, memproyeksikan kedaulatan, dan menghindari jebakan aliansi yang berpotensi merugikan. Ini adalah contoh nyata dari diplomasi yang cerdas (*shrewd diplomacy*) dalam era informasi, di mana kontrol atas narasi dan waktu penyampaian pesan sama pentingnya dengan substansi pesan itu sendiri.

6. Penutup dan Rekomendasi Kebijakan

Kesimpulannya, kebocoran rekaman rahasia Presiden Prabowo Subianto pada November 2025 bukan sekadar skandal penyadapan, tetapi lebih tepat dipahami sebagai sebuah instrument kebijakan luar negeri yang terencana dan sangat terukur, sebuah *kebocoran taktis*. Insiden ini mengungkap kompleksitas diplomasi Indonesia di tengah persaingan kekuatan besar, serta keberaniannya untuk menggunakan cara-cara tidak konvensional demi mempertahankan prinsip kedaulatan dan otonomi strategis. Logika *cakrawala cermin* yang diterapkan, dengan menyamakan posisi Taiwan dan Papua, merupakan argumen hukum dan politik yang kuat yang berakar pada prinsip non-intervensi dan mendukung kepentingan nasional Indonesia. Pasca-bergabung dengan BRICS, Indonesia menunjukkan peningkatan kepercayaan diri untuk menetapkan batasan yang jelas terhadap sekutu tradisionalnya tanpa secara terbuka menolak kerjasama. Rekomendasi kebijakan ke depan adalah, **pertama**, pemerintah perlu terus mengkonsolidasikan posisi ini dengan memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan untuk melindungi kedaulatan siber dan komunikasi strategis. **Kedua**, diplomasi publik perlu diintensifkan untuk menjelaskan konsistensi politik bebas-aktif dan prinsip

kedaulatan kepada semua pihak. **Ketiga**, Indonesia harus secara aktif membangun mekanisme diplomasi preventif dalam kerangka ASEAN dan BRICS untuk mengelola perbedaan pandangan dengan mitra seperti Jepang dan AS, sehingga insiden serupa tidak perlu menjadi pilihan utama di masa depan. Pada akhirnya, rekaman yang bocor itu adalah cermin dari sebuah Indonesia yang semakin assertif dalam panggung global, yang dengan lantang menyatakan bahwa kepentingan nasional dan kedaulatannya adalah harga mati yang tidak dapat ditawar, dalam bahasa yang terdengar jelas oleh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Buku Putih Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Kemlu RI.
2. Sukma, R. (2020). *Indonesia and the World: Ideas, Parts, and Prospects*. Jakarta: CSIS Publications.
3. Anwar, D. F. (2021). *Indonesia's Foreign Policy: Political Weapon, International Law*. Singapore: ISEAS Publishing.
4. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2025). *Laporan Tahunan Pertahanan Negara*. Jakarta: Kemhan RI.
5. Parameswaran, P. (2024). *The Eagle and the Dragon: Southeast Asia's Tightrope Walk*. Washington D.C.: The Brookings Institution.
6. Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations. (1945). *Charter of the United Nations (Chapter I: Purposes and Principles)*. Diakses dari situs resmi PBB.
7. Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
8. Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Kerja Sama ASEAN-Indonesia 2023-2045*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021.
9. Suryadinata, L. (2022). *Indonesia's Foreign Policy under Jokowi and Beyond*. Singapore: World Scientific.
10. Treverton, G. F., & Gabbard, C. B. (2008). *Assessing the Tradecraft of Intelligence Analysis*. Santa Monica: RAND Corporation.